KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BKSAP Ikut Kawal Perlindungan PMI
Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Banyak Kasus TPPO

BKSAP Ikut Kawal Perlindungan PMI

Putu Supadma Rudana

KASUS Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) banyak menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar Negeri. Sejumlah orang sudah menjadi korban. Rata-rata mereka tertarik pada pekerjaan dengan iming-iming gaji besar dan persyaratan mudah.

Namun, ketika berada di luar negeri, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai. Saat korban meminta pulang, tempatnya bekerja meminta uang tebusan dan denda.

Salah satu kasus TPPO menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali berinisial NKM di Colombo, Srilanka. NKM merantau ke negeri orang karena tergiur pekerjaan dengan gaji besar yang dijanjikan. Sayangnya, saat sampai di negara tujuan, NKM diperlakukan tidak manusiawi.

Laporan kasus ini sampai ke Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana. Putu sangat prihatin dengan nasib yang dialami NKM. Dia pun meminta Dubes Indonesia untuk Srilanka Dewi Gustina Tobing memfasilitasi pemulangan NKM ke Tanah Air.

"Saya menelepon Ibu Dewi Tobing agar bergerak cepat, sigap, tanggap membantu NKM. Saya bersyukur NKM dipulangkan pada Kamis (29/6) dari Srilanka. Langkah cepat. *KBRI Srilanka memanggil* perusahaan bersangkutan dan memulangkan NKW ini patut diapresiasi," ujarnya, kemarin.

Politisi asal Bali ini berharap, Pemerintah membangun *blueprint* untuk melindungi PMI yang meliputi perlindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Perlindungan juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi.

Selama di BKSAP, Putu sering berkeliling negara dan mendapatkan laporan bahwa PMI banyak mendapat perlakuan tidak layak saat bekerja di luar negeri. Mereka diekspoloitasi.

"Ada yang belum dibayar, ada yang disiksa, ditipu, dan ada yang diperkerjakan tidak sesuai. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Pemerintah bersikap tegas dan mendata kembali agensi yang bermasalah. Cabut izinnya dan berikan hukum yang setimpal," tegas Putu.

Selain itu, Putu mendapatkan masukan dari berbagai perwakilan Indonesia di berbagai negara, bahwa anggaran pemulangan PMI tidak mencukupi. Sehingga, diperlukan penganggaran yang komprehensif untuk shelter, pembayaran denda, dan pemulangan kembali WNI ke Indonesia yang mengalami TPPO.

Putu berharap, aparat penegak hukum bekerja keras menggagalkan TPPO ke luar negeri. Begitu juga pihak Imigrasi dan BP2MI harus terus mengawal dengan ketat para pekerja migran yang akan berangkat keluar negeri.

Untuk BKSAP, Putu memastikan akan turut mengawal perlindungan untuk para PMI ini. Sebab, fungsi BKSAP untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.

Termasuk, kerja sama dengan organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

"Tugas kami bukan hanya membina hubungan bilateral, tetapi juga menjaga harkat *dan martabat bangsa dengan* mengawal pemberian perlindungan kepada warga negara di luar negeri, tak terkecuali para pekerja imigran. Karena pekerja imigran Indonesia kita ini adalah pahlawan devisa negara,"jelas Putu. ■ USU